BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

3.1.1 Kependudukan Kota Bandung

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda, sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan etnis lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia). Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa.

Penduduk Kota Bandung menurut Registrasi Penduduk sampai dengan bulan Maret 2004 berjumlah : 2.510.982 jiwa dengan luas wilayah 16.729,50 Ha. (167,67 Km 2), sehingga kepadatan penduduknya per hektar sebesar 155 jiwa. Komposisi penduduk warga negara asing yang berdomisili di Kota Bandung adalah sebesar 4.301 jiwa. Jumlah warga negara asing menurut catatan Kantor Imigrasi Bandung yang berdiam tetap di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 2.511 jiwa, sedangkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 5.849 jiwa.

Program Pemerintah dalam hal mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi khususnya di Kota Bandung telah dilaksanakan Program Transmigrasi ke luar Pulau Jawa dengan jenis transmigrasi terbesar adalah Transmigrasi TU sebanyak 76 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 86, sedangkan daerah tujuan Transmigrasi TU adalah Propinsi Riau dan Kalimantan tengah. Kota Bandung menjadi kota terpadat di Jawa Barat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.228 jiwa per kilometer persegi. Total jumlah penduduk di kota Bandung mencapai 2.390.120 jiwa sampai tahun 2010. Jumlah tersebut jauh dari angka ideal. Semestinya, setiap satu kilometer persegi jumlah penduduk adalah 1.000 jiwa atau 40 jiwa per hektar.

3.1.2 Mata Pencaharian Penduduk Kota Bandung

Pertanian sebagai mata pencaharian utama dalam kehidupan manusia dibeberapa bagian dunia telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang dalam sejarah kebudayaan manusia. Hal itu sejalan dengan tahap perkembangan pengetahuan manusia tentang jenis-jenis tanaman pangan dan cara penanamannya. Proses perubahan sistem mata pencaharian berburu dan meramu menjadi sistem mata pencaharian bercocok tanam itu merupakan suatu peristiwa besar dalam proses perkembangan kebudayaan manusia.

Para ahli menyebut peristiwa itu sebagai suatu “revolusi” dalam peradaban manusia. Mata pencaharian penduduk Kota Bandung berbeda-beda mulai dari pegawai Negeri, pegawai swasta, petani, pedagang, TNI dan lain-lain. Berdasarkan data yang telah diterima dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat,

bahwa mata pencaharian penduduk Kota Bandung untuk pegawai swasta sebesar 4,002,000 pada jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3,164000.

Gambar 3.1
Daftar Rekafitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung
Berdasarkan Pendidikan dan Mata Pencaharian Tahun 2010

NO	PENDIDIKAN UMUM DAN MATA PENCAHARIAN TETAP	WNI			WNI KETURUNAN			WN ASING			JUMLAH			KET
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
A	PENDIDIKAN													
1	Tidak / belum sekolah	8364	8047	16411	366	415	781	0	0	0	8730	8462	17192	
2	Tidak tamat SD	3091	3292	6383	134	165	299	0	0	0	3225	3457	6682	
3	Belum Tamat SD	7916	7660	15576	400	467	867	0	0	0	8316	8127	16443	
4	Tamat SD	7841	7292	15133	375	449	824	0	0	0	8216	7741	15957	
5	S L P	7353	7538	14891	469	489	958	3	1	4	7825	8028	15853	
6	S L A	8607	9204	17811	971	774	1745	0	0	0	9578	9978	19556	
7	Akademi / Sarjana Muda	1603	1449	3052	419	499	918	0	0	0	2022	1948	3970	
8	Sarjana	1392	1079	2471	501	300	801	1	0	1	1894	1379	3273	
	Jumlah	46167	45561	91728	3635	3558	7193	4	1	5	49806	49120	98926	
B	MATA PENCAHARIAN													
1	Pegawai Negeri	3733	1568	5301	2	4	6	0	0	0	3735	1572	5307	
2	A B R I	244	4	248	0	0	0	0	0	0	244	4	248	
3	Pegawai Swasta	10535	9037	19572	1221	756	1977	1	0	1	11757	9793	21550	
4	Tani	227	42	269	0	0	0	0	0	0	227	42	269	
5	Dagang	7260	5419	12679	858	630	1488	0	0	0	8118	6049	14167	
6	Pelajar	14084	14940	29024	595	596	1191	0	0	0	14679	15536	30215	
7	Mahasiswa	1823	1265	3088	252	243	495	0	0	0	2075	1508	3583	
8	Pensiunan	1153	726	1879	1	0	1	0	0	0	1154	726	1880	
9	Lain-lain	7106	12560	19668	706	1329	2035	3	1	4	7817	13890	21707	
	Jumlah	46167	45561	91728	3635	3558	7193	4	1	5	49806	49120	98926	

Sumber: www.wikipedia.go.id, 2011

3.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung

3.2.1 Sejarah Dinas Pendidikan Kota Bandung

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, tepatnya pada tahun 1951 di Propini Jawa Barat telah dibentuk Jawatan Pendidikan. Dengan tugas pokoknya menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah, Pendidikan Masyarakat diseluruh Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota dijabat rangkap oleh Kantor Inspektorat (KKI).

Pada tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 8 Tahun 1981, jawatan nomeklaturnya menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan untuk Kabupaten menjadi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 (INMENDAGRI No. 11/1990). Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1990 (PERDA No. 11 Tahun 1990), pada tingkat Kabupaten / tingkat Kotamadya serta di Kecamatan segera dibentuk Dinas Pendidikan. Dilandasi peraturan tersebut maka pada :

1. Tingkat Kabupaten / Tingkat Kota dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
2. Tingkat kecamatan Cabang DInas Pendidikan Kecamatan / Kota Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, diatur oleh PERDA No. 19 Tahun 1990, nomor : 07,08,09 dan 10 Tahun 1991.

Dengan PERDA ini status Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak lagi merupakan instansi vertikal dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan instansi otonom dari Pemerintah Bandung, yang bertanggungjawab serta melaksanakan instruksi langsung dari Kepala Walikota Bandung.

Sejalan dengan tuntutan pembanguna di bidang pendidikan yang semakin tinggi serta pelayanan yang lebih cepat, maka perlu adanya penyempurnaan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. Untuk memenuhi hal tersebut maka PERDA Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 disempurnakan dengan PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 1994 (PERDA No. 18/1994), tentang susunan Daerah Kota Bandung, Kedudukan, Tugas Pokok

dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung .

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Banyak kewenangan yang semula merupakan urusan pemerintah diserahkan kepada provinsi, dan daerah Kabupaten atau Kota. Sekian banyak kewenangan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pendidikan. Hal ini nampak pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut : Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Sebagai konsekuensi lahirnya Undang-undang diatas maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten / kota perlu dilakukan restrukturisasi organisasi. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bukan saja mengelola Sekolah Dasar tetapi meliputi seluruh bidang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah termasuk pendidikan yang selama ini dikelola oleh Departemen Agama.

Restrukturisasi berbagai pendidikan dikota Bandung diawali dengan dilakukan Merger / penggabungan antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, Khususnya yang membidangi masalah pendidikan. Sebagai gabungan dari ketiga institusi itu maka terbentuklah Dinas Pendidikan Kota Bandung pada

tanggal 7 Maret 2001 melalui PERDA No. 5 Tahun 2001. Kromologis terbentukmya Dinas Pendidikan Kota Bandung:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, tepatnya pada tahun 1951 di Propini Jawa Barat telah dibentuk Jawatan Pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota dijabat rangkap oleh Kantor Inspektorat (KKI).
2. ada tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 8 Tahun 1981, jawatan nomeklaturnya menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan untuk Kabupaten menjadi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 (INMENDAGRI No. 11/1990). Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1990 (PERDA No. 11 Tahun 1990), pada tingkat Kabupaten / tingkat Kotamadya serta di Kecamatan segera dibentuk Dinas Pendidikan
4. Tingkat kecamatan " Cabang DInas Pendidikan Kecamatan / Kota ".Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, diatur oleh PERDA No. 19 Tahun 1990, nomor : 07,08,09 dan 10 Tahun 1991.
5. PERDA Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 disempurnakan dengan PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 1994 (PERDA No. 18/1994), tentang susunan Daerah Kota Bandung, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung .
7. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Banyak kewenangan yang semula merupakan urusan pemerintah diserahkan kepada propinsi, aderah Kabupaten dan Kota. Diantara sekian banyak kewenangan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pendidikan. Hal ini nampak pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut : " Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja".
8. Terbentuklah Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 7 Maret 2001 melalui PERDA No. 5 Tahun 2001.

3.2.2 Visi, Misi dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung

Untuk mendukung visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, maka dirumuskanlah Visi, Misi dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut :

Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung:

"Mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang Cerdas, Sehat, Produktif, Berakhlak Mulia dan Cinta Lingkunagan Hidup guna mendukung Bandung Bermartabat".

Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung :

1. Peningkatan aksesibelitas dan mutu pendidikan menuju standar nasional pendidikan;
2. Pengembangan pendidikan karakter (character building) menuju akhlak mulia;
3. Pengembangan sekolah sehat dan sekolah berwawasan lingkungan;
4. Pengembangan kepemudaan, olahraga, dan seni budaya;
5. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan
6. Pengembangan good governance melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan warga Kota Bandung melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai tuntutan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana pendidikan untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan;

3. Meningkatkan produktivitas kerja dan terciptanya pelayanan yang dapat memuaskan stakeholder pendidikan;
4. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas;
5. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan secara efesien dan efektif sesuai dengan perkembangan iptek.Sedangkan sasaran penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang persekolahan dititikberatkan pada :
   a. Pendidikan Prasekolah, sasarannya untuk peningkatan pelayanan/ penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Pendidikan Dasar, sasarannya untuk :
      1) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs.
      2) Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS).
      3) Terwujudnya manajemen pendidikan berbasis sekolah
      4) Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
      5) Tuntasnya Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun.
   c. Pendidikan Menengah, sasarannya untuk :
      1) Meningkatnya APK dan APM SMA/MA dan SMK.
      2) Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS).
      3) Terwujudnya manajemen pendidikan berbasis sekolah

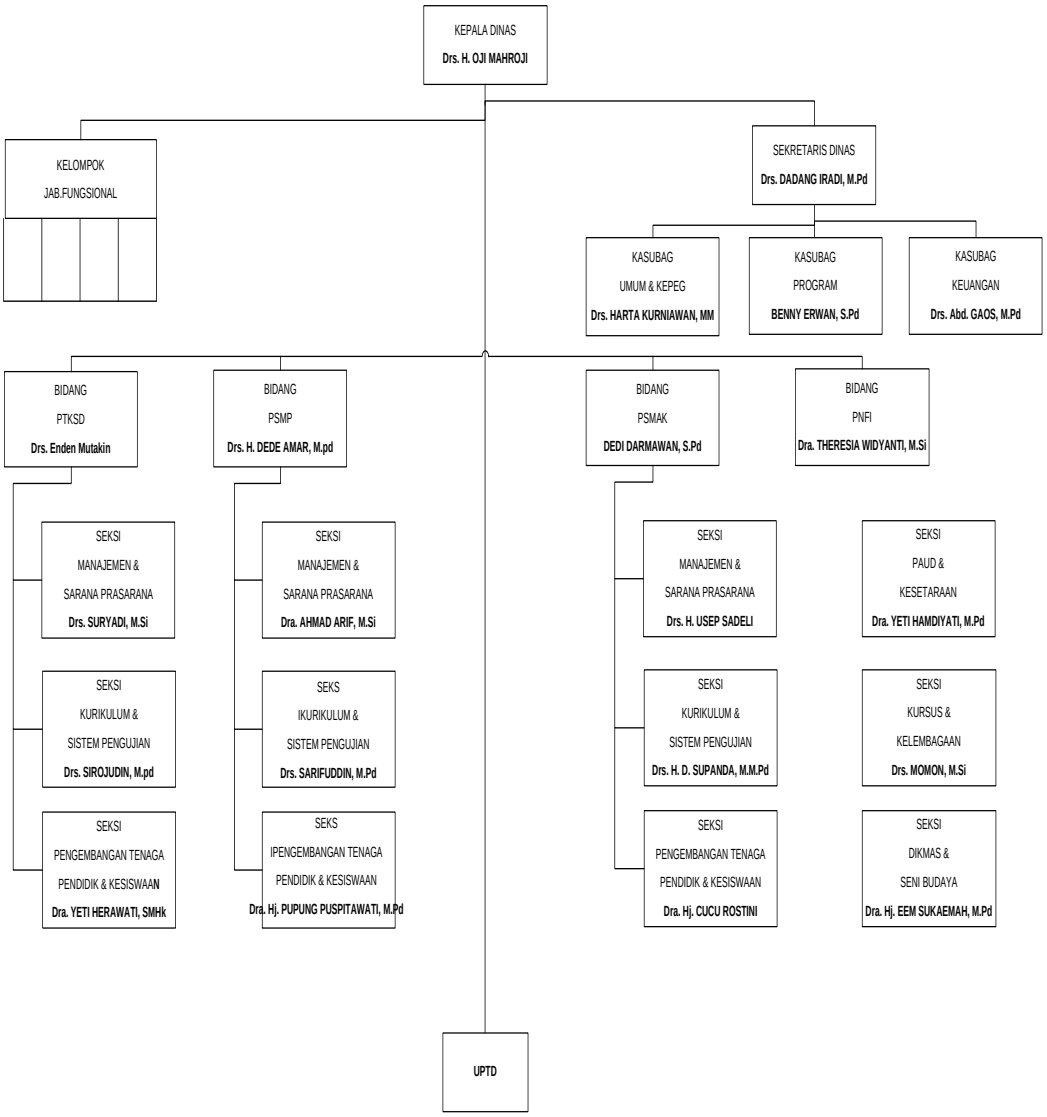
4) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah kejuruan.
5) Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6) Terlaksananya perintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Wajar Dikmen) 12 Tahun.

d. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, sasarannya untuk meningkatkan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.

3.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk dapat menjalan tugasnya maka memiliki struktur organisasi yang dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Berikut ini beberapa tugas pokok dan fungsi pada Badan Dinas Pendidikan Kota Bandung :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretaris Dinas

   Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordiansian tugas-tugas bidang.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

4. Sub Bagian Program

   Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program.

5. Sub Bagian Keuangan

   Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

6. Bidang PendidikanTaman kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD)

   Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di bidang Pendidikan lingkup pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

7. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan PTKSD

   Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

8. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD

   Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar lingkup kurikulum dan sistem pengujian pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

9. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD

   Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman kanak-

kanak dan Pendidikan Dasar (PTKSD) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

10. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP)

    Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di bidang Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

11. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan PSMP

    Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP).

12. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP

    Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar lingkup kurikulum dan sistem pengujian pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

13. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP

    Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP).

14. Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK)

    Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

15. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK

    Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup manajemen dan sarana prasarana PSMAK.

16. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK

    Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAK.

17. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK

    Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan.

18. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

    Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup pendidikan non formal dan informal.

19. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan

    Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan.

20. Seksi Kursus dan Kelembagaan

    Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup kursus dan kelembagaan.

21. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya

    Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya.

22. Kelompok Jabatan Fungsional

    Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3.3 Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIM NUPTK)

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah nomor yang diberikan kepada setiap individu yang sedang bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal yang bersifat unik secara nasional. Salah satu upaya dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Perkembangan *electronic government*, menuntut pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Perkembangan *electronic government* tersebut, dikembangkan oleh Menteri pendidikan nasional melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) yang selanjutnya dilaksanakan oleh LPMP Jawa Barat yang diserahkan penanganannya kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Salah satu komponen strategis dalam mendukung hal tersebut adalah dengan memperkuat sistem dan koordinasi antara pemerintah LPMP Jawa Barat dengan pihak Dinas Kab/Kota dalam perencanaan, pengumpulan data, analisis data dengan menggunakan SIMNUPTK yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal PMPTK. Sistem ini msh terus dikembangkan dan saat ini telah dikembangkan versi *online*-nya. Dengan versi ini diharapkan alur data dari Kab/Kota bisa *real time,* sehingga pemerintah pusat dapat mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan analisis data tersebut.

Dalam rangka memberikan informasi dan pendampingan tentang perkembangan SIMNUPTK bagi operator Kab/Kota yang ada di Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan workshop pengelolaan database NUPTK *Online*.

3.3.1 Gambaran Umum *Website www.pmptk.kemdiknas.go.id*

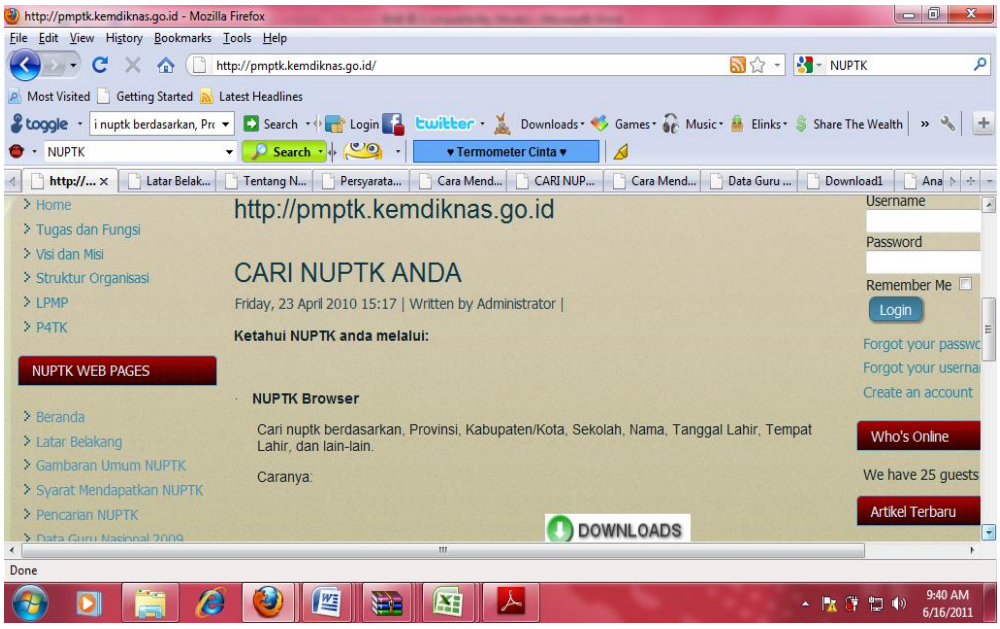
Website www.pmptk.kemdiknas.go.id merupakan sebuah *website* resmi dari Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional. *Website www.pmptk.kemdiknas.go.id* terbentuk beringinan dengan PMPTK itu sendiri. Pada saat itu sebelum tahun 2002 telah dirintis melalui SIM Guru yang hasilnya belum pernah tuntas dan data yang muncul sangat bervariasi antara satu unit dengan unit lainnya, sehingga menimbulkan keraguan bagi para pengguna data PTK baik untuk perencanaan maupun untuk kepentingan studi. Mulai tahun 2004 SIM Guru berganti perangkat lunak menjadi SIM PTK, sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan data PTK (khusus guru) sebanyak 2.783.321 guru walaupun kita yakini bahwa data tersebut masih perlu divalidasi, akan tetapi data tersebut menjadi kesepakatan yang digunakan di lingkungan Depdiknas. Pada akhir tahun 2006 melalui APBN-P dirintis SIM NUPTK yang merupakan pengembangan dari SIM PTK sebagai upaya peningkatan akurasi, cermat dan sistimatis data PTK untuk mengantisipasi adanya duplikasi data.

Pada *website www.pmptk.kemdiknas.go.id* pemerintah membuatkan satu *pages* tersendiri mengenai SIM NUPTK. Begitu *pages* tersebut di klik, akan tampil beberapa informasi mengenai SIM NUPTK, baik mengenai latar belakang, gambaran umum NUPTK, syarat mendapatkan NUPTK, pencarian NUPTK, data

guru nasional, download, analisis guru, dan disediakannya *form* kontak kami bagi PTK dan sebagainya.

Website *www.pmptk.kemdiknas.go.id* bertujuan agar pemohon NUPTK tidak perlu repot untuk bertanya kesana-sini, termasuk kepada petugas. Apabila PTK ingin mengajukan pertanyaan pada *website* *www.pmptk.kemdiknas.go.id* disediakan sarana lain seperti *form* pengaduan yaitu melalui *e-mail* yang disediakan pada *website* ini atau langsung melalui telepon. Pelayanan melalui *website* ini merupakan suatu bukti bahwa Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional sungguh-sungguh membuka diri terhadap kebutuhan PTK dan sekaligus menempatkan diri untuk siap dikoreksi terutama oleh PTK. Berikut ini tampilan dari *website* *www.pmptk.kemdiknas.go.id* sebagai berikut :

Gambar 3.3
Tampilan halaman utama *website* *www.pmptk.kemdiknas.go.id*



Sumber : *www.pmptk.kemdiknas.go.id* (2011)

Gambar di atas merupakan tampilan awal jika kita ingin mangakses informasi pelayanan SIM NUPTK melalui *www.pmptk.kemdiknas.go.id* pada Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, pada halaman ini juga kita dapat langsung memilih halaman yang akan kita buka atau perlukan informasinya, halaman ini berisi antara lain :

1. MENU UTAMA

   Menu utama dari *pages* ini meliputi Home yang berisi tentang NUPTK, Tugas dan Fungsi PMPTK, Visi Misi PMPTK, Struktur organisasi PMPTK, LPMP dan P4TK.

2. NUPTK *WEB PAGES*

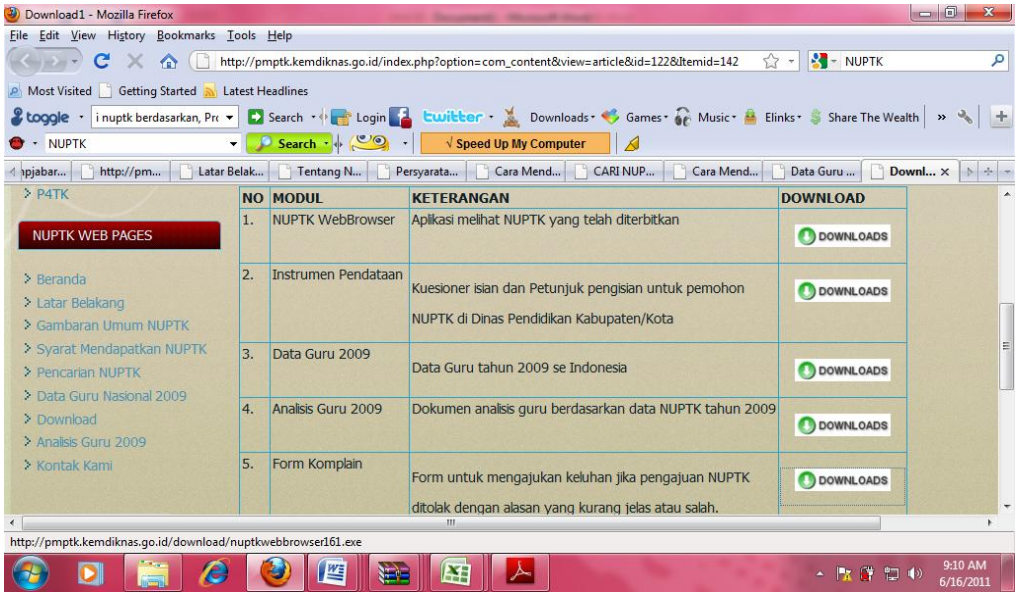
   Layanan NUPTK *WEB PAGES* adalah layanan yang meliputi tentang beranda dimana terdapat alur data NUPTK, Latar Belakang yang berisi tentang latar belakang NUPTK, Gambaran umum NUPTK berisi tentang NUPTK, Syarat mendapatkan NUPTK, Pencarian NUPTK mengenai NUPTK *Browser*, Data Guru Nasional, Halaman Download NUPTK, Analisis Guru, dan Kontak kami yang dapat dihubungi apabila ada komplen.

3. INFORMASI

   Pages Informasi yang didalamnya terdapat Berita PMPTK, Arsip berita, Photo Gallery yang berisi photo kegiatan pelatihan, Forum PMPTK yang memuat masalah NUPTK dan Sertifikasi, Juknis tambahan penghasilan dan Pengumuman CPNS.

Berikut ini adalah tampilan Pelayanan SIM NUPTK pada *website* *www.pmptk.kemdiknas.go.id* yang dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut :

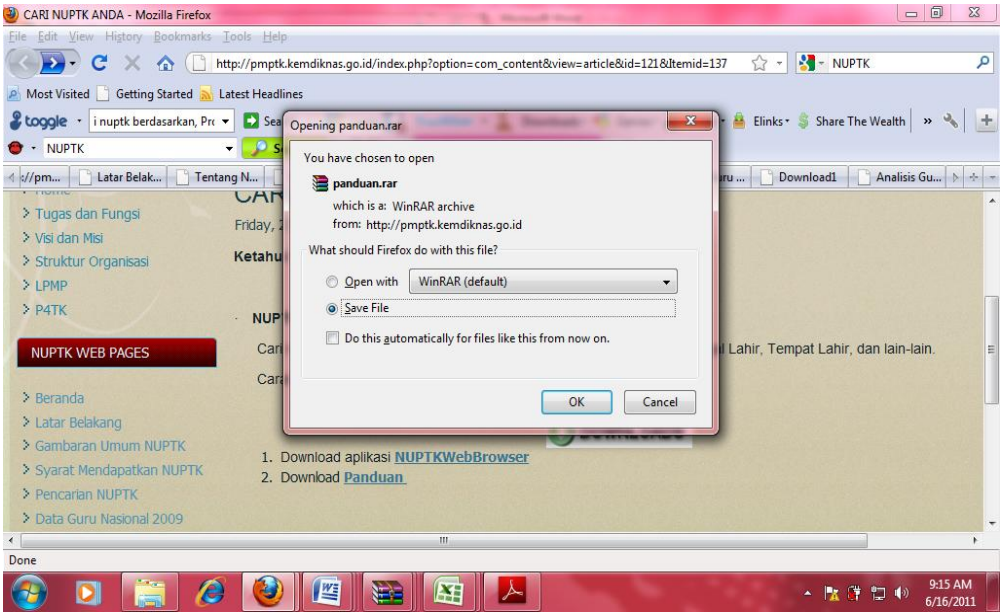
Gambar 3.4
Tampilan Pelayanan SIM NUPTK



Sumber : *www.pmptk.kemdiknas.go.id* [2011]

Pada gambar 3.4 merupakan tampilan pelayanan SIM NUPTK pada *website* Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional. Menu tampilan ini berisi mengenai NUPTK *webbrowser*, instrumen pendataan, data guru, analisis guru, dan *form* komplain yang dapat di *download* oleh kalangan masyarakat. Jika kita mengklik salah satu dari menu pelayanan SIM NUPTK ini, misalnya seperti gambar 3.4 kita mengklik pelayanan mengenai panduan maka dalam tampilan akan muncul pelayanan untuk *mendownload*, dan tampilannya seperti berikut:

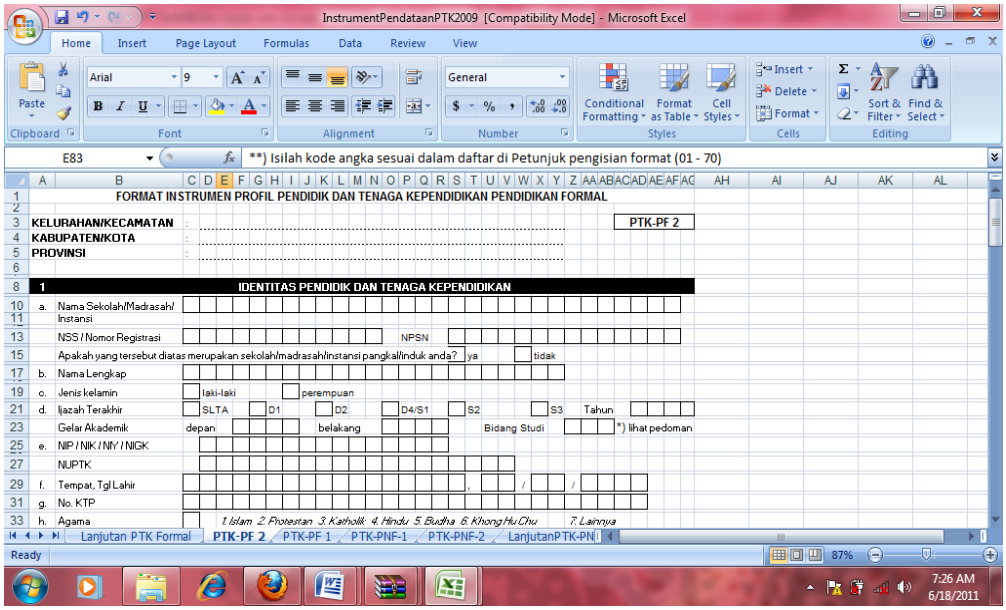
Gambar 3.5
Tampilan untuk *mendownload* NUPTK *webbrowser*



Sumber : *www.pmptk.kemdiknas.go.id* [2011]

Setelah kita mengklik pelayanan panduan maka tampilan akan muncul seperti gambar 3.5 Tampilan ini berfungsi untuk mengunduh atau *mendownload form* panduan yang didalamnya terdapat materi NUPTK, panduan *web browser*, panduan pengajuan NUPTK yang didalamnya terdapat formulir NUPTK, Panduan sincron data lokal dan pusat pada SIM NUPTK *client*. Pada gambar diatas terlihat perintah apakah anda ingin *mendownload* dengan winrar lalu tekan OK atau anda dapat langsung mengunduh atau *mendownload*-nya melalui *save as* (simpan berkas) dan simpan melalui CD-Room atau flashdisk, setelah itu untuk pengajuan NUPTK kita dapat mengambil formulir yang sudah di jelaskan di atas bahwa formulir terdpat di dalam panduan NUPTK dan tampilannya seperti berikut:

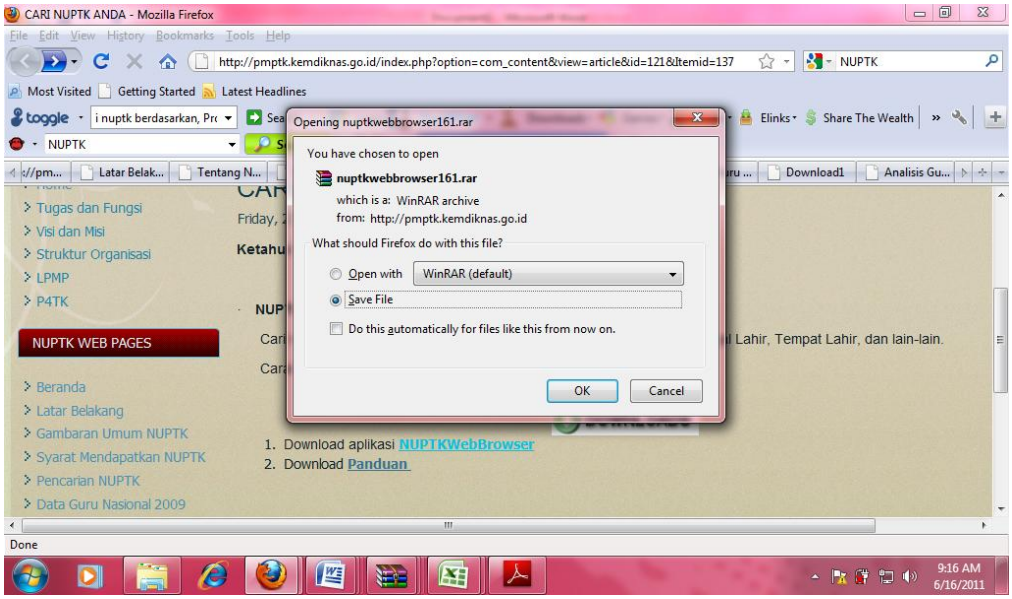
Gambar 3.6
Tampilan Formulir Pengajuan NUPTK



Sumber : *www.pmptk.kemdiknas.go.id* [2011]

Berikut ini adalah tampilan gambar mengenai formulir pengajuan NUPTK. Dalam *form* ini berisi mengenai nama sekolah, nama pemohon, alamat pemohon, tempat tanggal lahir, NIP, No KTP, status kawin, orangtua, setatus kepegawaian, dan untuk pengiriman formulir ini PTK dapat mengirimkan formulir ke Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota tersebut akan memasukkan data yang akan di kirim ke LPMP dan dari LPMP akan mengirimkan ke Bagren Setditjen PMPTK, lalu menerbitkan hasilnya. Untuk PTK dapat melihat hasil NUPTK nya dapat datang ke Dinas Pendidikan dan menemui bagian dari SIM NUPTK tersebut atau dapat di lihat melalui NUPTK *web browser* dan dapat *didownload* melalui *www.pmptk.kemdiknas.go.id* dengan tampilan seperti berikut:

Gambar 3.7
Tampilan NUPTK *web browser*



Sumber : *www.pmptk.kemdiknas.go.id* [2011]

Setelah kita mengklik pelayanan NUPTK *web browser* maka akan ada perintah untuk membuka langsung atau menyimpannya terlebih dahulu. Setelah NUPTK *web browser* berhasil *didownload* maka aplikasi dapat di buka dan *diinstall* langsung. Petunjuk penginstalan ada di dalam winrar yang sudah *didownload* dalam *form* NUPTK *web browser* , sedangkan untuk operatornya menggunakan database SIM NUPTK *Client-Server* berfungsi sebagai *server* yang terkoneksi dengan jardiknas atau internet. DB-*Server* NUPTK memiliki kode aktifasi yang diberikan ke tiap-tiap operator LPMP dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Setiap instansi hanya dapat bekerja pada satu DB-*Server* NUPTK.

3.3.2 SIM NUPTK *web browser*

1. Form Login NUPTK *web browser*

Aplikasi SIM NUPTK sebuah aplikasi yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan sistem manajemen. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan untuk pelayanan publik SIM NUPTK yang terus di tuntut untuk lebih maju dalam pendataan PTK yang menjadi landasan dalam menghadapi perkembangan. Aplikasi ini dapat didownload dalam website yang sudah diterangakn diatas untuk melihat hasil dari pengajuan NUPTK dari PTK yang NUPTK nya sudah keluar. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya bentuk dari aplikasi tersebut berawal dari gambar di bawah ini.

Gambar 3.8
Login SIM NUPTK *web browser*



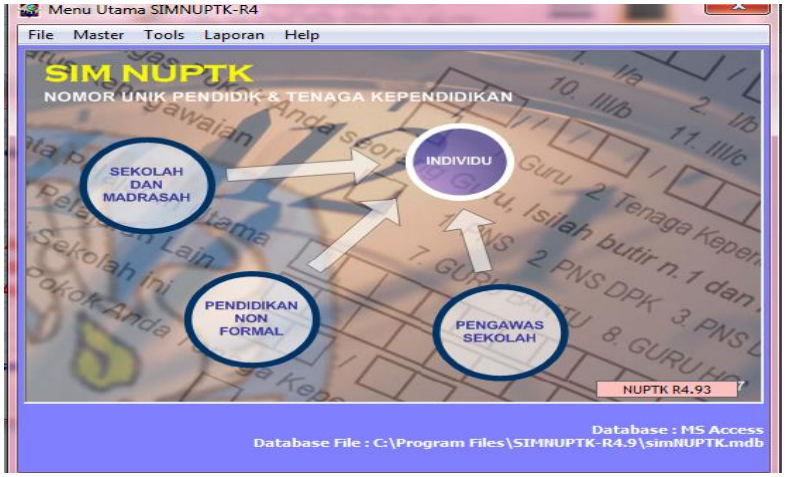
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Pertama kali menggunakan aplikasi SIMNUPTK, harus melakukan konfigurasi *server*. Langkah ini berfungsi untuk menentukan komputer mana yang akan digunakan sebagai *server* (petugas *entry*) aplikasi, dimana *database* sebagai tempat penyimpanan data aplikasi berada atau telah terinstal pada komputer yang akan dijadikan *server*

2. Form Desktop Menu Utama Aplikasi SIM NUPTK

Tampilan jendela kerja (*desktop*) aplikasi SIM NUPTK mencakup dua menu di dalamnya antara lain: *Pertama*, *Menubar* Adalah suatu kumpulan daftar menu atau fasilitas aplikasi yang dikelompokkan sesuai dengan kategori. Terdapat lima kategori menu utama dan beberapa sub menu dari setiap menu utama di dalam *Menubar* yaitu antara lain: menu *File*, *Master*, *tools*, *laporan*, *help*. Setiap sub menu di dalam menubar mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. *Kedua*, *Toolbar* Adalah tombol-tombol yang memiliki gambar (*icon*), yang berfungsi sebagai jalan pintas (*Shortcut*) untuk menjalankan fasilitas yang terdapat didalam aplikasi.

Gambar 3.9
Tampilan Desktop Menu Utama Aplikasi SIM NUPTK



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Tampilan pada gambar 3.9 tersebut adalah menu utama dari aplikasi SIM NUPTK yang berfungsi untuk memulai atau mengawali berbagai menu yang ada. Terdapat komponen di dalam tampilan yaitu antara lain: Individu, sekolah dan

madrasah, pendidikan non formal, pengawas sekolah. Langkah selanjutnya adalah memilih Modul NUPTK untuk mengawalinya.

3. Form Hasil NUPTK

Langkah selanjutnya untuk melihat hasil data para pemohon yang berbentuk identitas sekolah kemudian klik daftar nama sekolah atau nama pemohon. Terdapat beberapa pilihan didalamnya yang kemudian pilih salah satu jenis yang di inginkan yang dapat dilihat seperti gambar berikut ini.

Gambar 3.10
Daftar Modul Hasil NUPTK



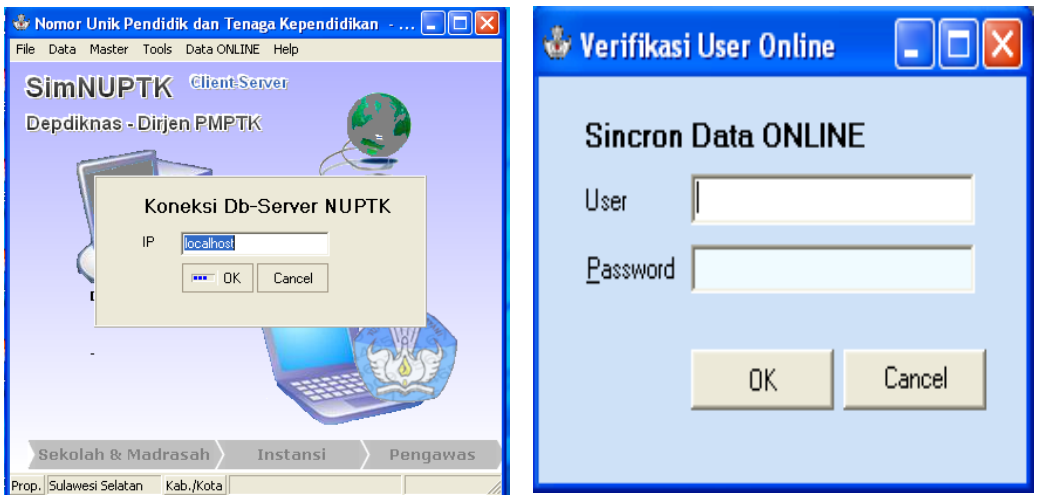
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

3.3.3 SIM NUPTK *Client Server*

SIM NUPTK *Client server* adalah database yang berbentuk My-Sql, khusus untuk operator yang menggunakan database SIM NUPTK *Client Server*

berfungsi sebagai server yang terkoneksi dengan jardiknas atau internet. DB-Server NUPTK memiliki kode aktifasi yang diberikan ke tiap-tiap operator LPMP dan Dinas Pendidikan kab/kota. Setiap instansi hanya dapat bekerja pada satu DB-Server NUPTK. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya bentuk dari aplikasi tersebut berawal dari gambar di bawah ini.

Gambar 3.11
Form Depan Tampilan Aplikasi dan Aplikasi Login

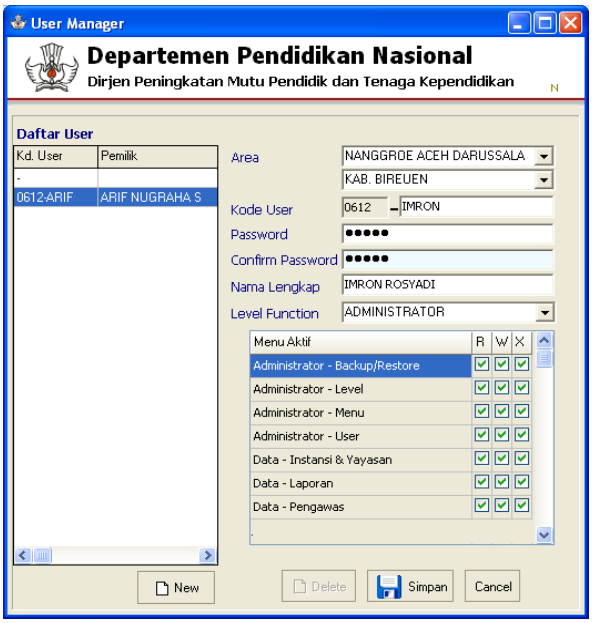


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Tampilan pada gambar 3.11 tersebut adalah *Form* Depan Tampilan Aplikasi dan Aplikasi Login dimana keduanya saling berkaitan, dengan begitu untuk menjalankan aplikasi SIM NUPTK Client Server dengan klik ganda file SIM NUPTK Client Server yang sebelumnya dikopikan ke komputer anda. Akan muncul *form* depan tampilan aplikasi. Perhatikan setiap anda menjalankan aplikasi, maka otomatis nuptk browser juga terbuka. Setelah itu untuk verifikasi *user online* Jika anda baru pertama kali menjalankan aplikasi login dengan *username* dan *Password* klik OK. Setelah anda melakukan login sementara

dengan *username* dan *Password default*, anda harus membuat *user* terlebih dahulu. Untuk membuat *user* dengan *user level* Administrator adalah sebagai berikut:

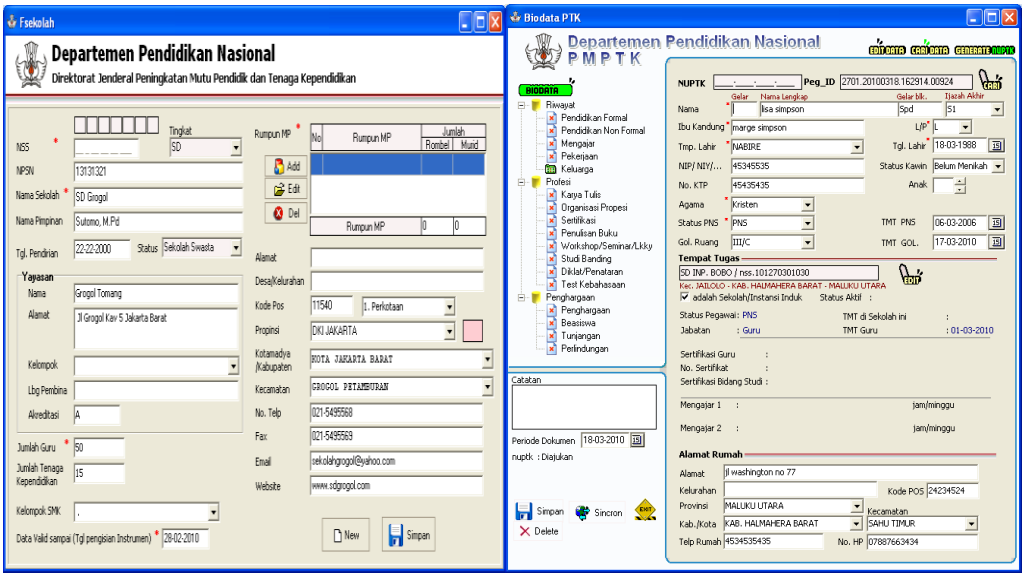
Gambar 3.12
Form Tampilan Membuat User SIM NUPTK *Client-Server*



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Membuat *user* dengan *user level* Administrator adalah dengan Klik menu File, pilih Administrator, *User* Manajemen Klik tombol *New* Isi semua informasi yang ada, sesuaikan dengan tempat anda. Setelah selesai maka *user* dapat menggunakan database untuk menambah data baru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.13
Form Tampilan Penambahan Data Baru Instansi Dan Individu



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Penambahan Instansi Baru jika ada sekolah atau instansi yang belum terdaftar di database maka anda harus mengisi data-data sekolah/instansi tersebut. Cara menambahkan sekolah/instansi baru sebagai berikut: sebagai contoh kita akan menambahkan sekolah baru dengan Klik Menu Data, pilih Sekolah/Instansi/Yayasan, lalu Daftar Sekolah. Akan muncul *Form* Instansi_list Klik tombol Buat Sekolah Baru yang terletak disebelah kiri bawah *form*. Akan tampil *form* baru yaitu sekolah. Klik tombol *New*, kemudian isi semua informasi tentang sekolah yang ingin ditambahkan. Klik *Add* untuk mengisi jumlah Rombel. Setelah lengkap terisi, klik Simpan. Data sekolah baru telah tersimpan dan siap diisi dengan data PTK nya.

Untuk penambahan individu baru, harus melalui sekolah/institusinya, sehingga tidak ada individu yang tidak mempunyai tempat tugas (lost link). Pada saat melakukan entri, juga harus dipastikan bahwa individu tersebut belum ada didatabase dengan menggunakan fasilitas pencarian yang ada di aplikasi. Hal ini untuk memastikan kemungkinan individu terdaftar di sekolah /intansi lain.

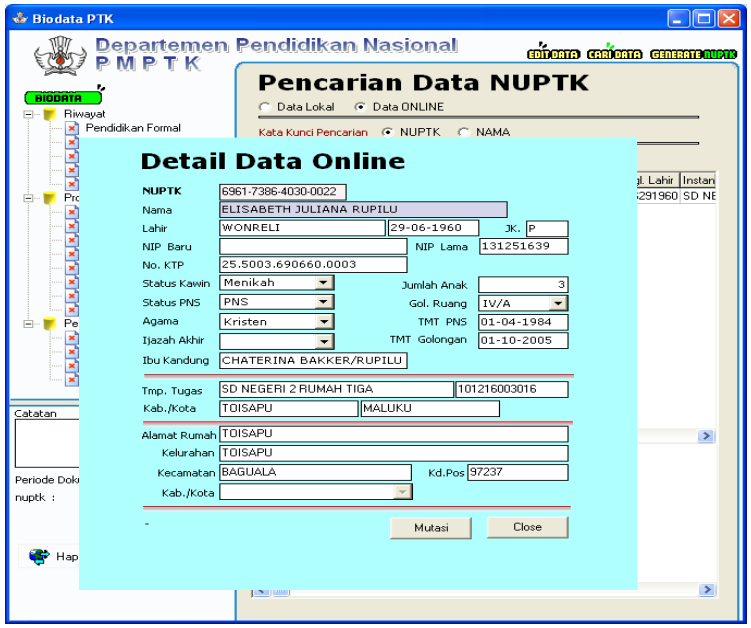
Langkah penambahan individu berikut dilakukan untuk penambahan PTK di sekolah. Klik short cut Sekolah & Madrasah yang ada didepan aplikasi. Pilih di drop down menu Propinsi, Kabupaten/Kota dari sekolah yang dicari. Klik *icon* open untuk menampilkan daftar sekolah. Akan tampil daftar sekolah di daerah tersebut. Klik ganda sekolah yang ingin ditambahkan PTK nya. Akan tampir *form* ptk_list, Klik tombol Buat PTK Baru, akan tampil *Form* Biodata PTK.

Tampilan biodata untuk PTK baru dicari terlebih dahulu Individu yang ingin tambahkan untuk memastikan individu tersebut belum ada didatabase di sekolah/instansi yang berbeda. Tulis nama PTK kemudian klik tombol Cari. Jika nama individu ada didaftar, select individu tersebut, kemudian klik tombol Pilih. Lakukan beberapa perbaikan atau pemutakhiran data individu sesuai keperluan, kemudian Klik *icon* Simpan, dialog konfirmasi akan muncul, klik OK.

Jika pada proses pencarian individu tidak ditemukan maka anda harus melakukan entri data individu tersebut. Klik tombol skip pada tampilan cari. Isi data-data individu dengan lengkap, klik pula *icon* Edit untuk memasukkan data-data tempat tugas PTK. Sama dengan sebelumnya, Klik *icon* Simpan, *form* konfirmasi akan muncul. Klik OK, maka data PTK bersetatus diajukan. sedangkan untuk penyimpanan data mutasi dimana mutasi itu adalah PTK yang pindah tugas

dari satu instansi atau ke luar kab/kota, dapat menggunakan *form* mutasi yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.14
Form Tampilan Mutasi



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011

Gambar di atas adalah menu lampiran mutasi petunjuk dari pengisiannya dengan Pilih Individu lalu klik tombol Detail PTK *Online*. Klik tombol Mutasi, detail individu akan muncul dengan Tempat Tugas sudah ditempat yang baru. Klik *icon* edit untuk menyesuaikan informasi di tempat baru. *Form* Tugas PTK akan muncul, lengkapi sesuai dengan yang informasi yang ada. Klik tombol OK, cek kembali data yang mungkin harus diubah. Pastikan ijazah terakhir sudah terisi. Klik tombol Simpan. Akan muncul dialog konfirmasi yang menandakan mutasi telah berhasil dilakukan, Cek disekolah baru. PTK yang di mutasi telah terdaftar di sekolah tujuan.